

BAB III

SOCIAL DEVELOPMENT CONCEPT SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAN TREND KERJASAMA KORPORASI DAN LSM SEBAGAI BENTUK KEKUATAN BARU DALAM PEMBANGUNAN

Dalam pembangunan internasional, pengurangan angka kemiskinan telah menjadi “*Top Priority*” setiap aktor-aktor hubungan internasional, mulai dari negara, organisasi pemerintah internasional atau *International Government Organizations (IGO)*, organisasi non pemerintah atau *Non-Governmental Organizations (NGO)*, akademisi dan aktor-aktor lainnya. Di kawasan Sub-Sahara Afrika dimana Zambia menjadi salah satu negara yang berada di kawasan tersebut pengurangan tingkat kemiskinan di kawasan tersebut hampir stagnan, begitupun dengan beberapa kawasan lainnya. Kemiskinan kemudian berdampak pada munculnya persoalan-persoalan lain, dalam hal ini permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. *Social Development* muncul sebagai alternatif pembangunan internasional yang cenderung ekonomistik.¹

Sementara disisi lain, globalisasi juga menghadirkan atau memberikan eksistensi atau penguatan peran tersendiri bagi aktor-aktor hubungan internasional lain selain negara. Sebut saja korporasi atau *Multi-National Corporations (MNCs)/Trans-National Corporations (TNCs)* yang begitu digdaya dengan kesuperioritasannya dan mampu menjadi kekuatan yang sangat besar yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas dunia internasional saat ini. Begitu pula dengan kehadiran organisasi-organisasi non

¹ Budi Winarno, (2011). “*Isu-Isu Global Kontemporer*”. Yogyakarta, CAPS. Hal. 53

profit atau *Non-Governmental Organizations* (NGO) tingkatan domestik atau mancanegara yang pengaruh dan eksistensinya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sebagai bukti nyata betapa gerakan swadaya masyarakat begitu besar dampaknya, Stewart Acuff dari *Joseph S. Murphy Institute* menulis sebuah artikel mengenai peristiwa *The Battle of Seattle* pada tahun 1999. Artikel yang berjudul “The Battle in Seattle and Where We Go From Here” ini secara eksplisit menjelaskan betapa dahsyatnya gerakan masyarakat yang kurang lebih berjumlah 40.000 orang yang direpresentasikan oleh aktivis-aktivis NGO buruh pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa gerakan anti-globalisasi tersebut bisa sebegitu besar gerakannya.²

Dari pemaparan diatas, dengan pendekatan *Transformationalist*, penulis mencoba untuk menjabarkan pada bab 3 ini mengenai dasar-dasar kerjasama yang bisa dilakukan oleh korporasi dan NGO melalui konsep *Corporate Social Responsibility* dan *Social Development* dalam rangka melakukan pembangunan sosial di negara-negara sedang berkembang dan gagal (*Failed State*) dengan memfokuskan permasalahan atau contoh kasus kerja sama atau kemitraan yang dilakukan oleh korporasi Goldman Sachs dan Camfed International dalam rangka memberdayakan perempuan di Zambia.

² Stewart Acuff. (2000). “*The Battle In Seattle and Where We Go From Here*”. Joseph S. Murphy Institute, New York Hal. 30-34

A. Konsep *Social Development* sebagai Solusi terhadap Permasalahan Sosial di Zambia

Secara sederhana *Social Development* atau konsep pembangunan sosial ini merupakan konsep pembangunan masyarakat yang fokus penanganan masalahnya tidak hanya tertuju pada pembangunan aspek ekonomi saja, melainkan juga aspek sosial masyarakatnya. Di dalam studi ilmu Hubungan Internasional, narasi, wacana, gagasan, konsep dan teori yang berkenaan dengan pembangunan sangat banyak dan beragam macamnya. Pembangunan ekonomi, *State-Led Development*, *State-Center Development*, *Market-Driven Development* dan *Social Development* merupakan sedikit gagasan-gagasan yang penulis temukan dalam mencari wacana-wacana baru pembangunan itu sendiri.

Secara khusus, Budi Winarno di dalam bukunya yang berjudul “Isu-Isu Global Kontemporer” menyebutkan bahwa istilah, konsep ataupun paradigma pembangunan mulai menjadi polemik atau isu hangat yang dibicarakan pada tahun 1950-1970an, dimana seperti yang kita ketahui bersama, pada era tersebut banyak negara di Dunia Ketiga baru memperoleh kemerdekaannya, oleh sebab itu mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan krusial seperti kemiskinan dan keterbelakangan, hal ini tentu saja memunculkan gagasan pembangunan itu sendiri. Sebelum itu, memberikan penjabaran mengenai pembangunan dan pengimplementasiannya, diperlukan definisi khusus yang bisa kita jadikan

sebagai *stepping stone* untuk membahas konsep *Social Development* lebih lanjut.³

Mendefinisikan pembangunan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan atau proses kegiatan, proses pertumbuhan, proses perkembangan, atau proses kemajuan yang terus meningkat derajatnya, meninggalkan yang stagnan menuju suatu keadaan yang lebih maju karena kegiatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan itu.⁴ Istilah pembangunan atau *development* dalam kamus bahasa Inggris Cambridge Dictionary ditemukan bahwa “*The process in which someone or something grows or changes and becomes more advanced*” – Pembangunan adalah proses pertumbuhan atau perubahan menjadi lebih maju.⁵ Sementara itu, *World Bank* menyebutkan bahwa,

*“Sustainable development recognizes that growth must be both inclusive and environmentally sound to reduce poverty and build shared prosperity for today’s population and to continue to meet the needs of future generations. It must be efficient with resources and carefully planned to deliver immediate and long-term benefits for people, planet, and prosperity”*⁶

³ Budi Winarno hal. 77

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Cambridge. “*Development*”. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development>. Diakses 13 April 2017. Pukul 11.09

⁶ Worldbank. “*Sustainable Development*”.

<http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment>. Diakses pada 13 April 2017. Pukul 10.54

Disebutkan secara singkat bahwa gagasan pembangunan merupakan pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan dalam rangka membangun kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, penulis mengutip artikel yang menulis tentang pendapat Gandhi mengenai pembangunan sosial yang berbunyi,

*”Social Development is the sum total of the personal development of all people in a society, accompanied by a new social order which will permit and facilitate that occurrence – pembangunan sosial merupakan pembangunan menyeluruh bagi siapapun di masyarakat yang dibarengi dengan “new social order” yang disepakati dan difasilitasi oleh semua orang.”*⁷

Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai konsep *Social Development*, selama ini perencanaan dan atau pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan di negara terlalu berfokus pada pembangunan yang menekankan pemberdayaan pada negara dan atau pembangunan terhadap aspek ekonomi saja, sudah kita sebutkan sebelumnya diatas yaitu *State-Center Development* dan *Market-Driven Development*. Negara berusaha menjadi kuat dengan setiap kebijakan dan tindakannya, negara berusaha mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui paradigma pembangunan ekonomi (*Market-Driven Development*) tersebut. Tapi, apakah paradigma tersebut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sosial setiap individu di negara tersebut? Apakah

⁷ Purwowibowo. *“People Centred Development and State Center Development”*. Makalah Presentasi Kuliah Doktoral Universitas Padjajaran. Maret 2012

paradigma tersebut mampu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan? Atau apakah yang terjadi justru sebaliknya?

Mengutip salah satu definisi pembangunan oleh Alexander, pembangunan atau *Development* adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.⁸

B. Konsep *Social Development* oleh James Midgley: Peran Korporasi dan LSM dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

James Midgley dalam bukunya yang menjadi rujukan utama dari penulis untuk menjelaskan mengenai konsep *Social Development* berjudul “*Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*” pada tahun 1995. Buku ini, membahas sebuah pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia yang dikenal kemudian dengan konsep pembangunan sosial atau *Social Development*. Perbedaan antara konsep pembangunan sosial ini dengan konsep atau teori-teori tentang pembangunan lainnya terletak pada fitur atau ciri khasnya dalam usahanya untuk menyelaraskan kebijakan sosial dengan langkah-langkah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan proses pembangunan sosial masyarakat.

⁸ <http://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/>.
Diakses pada 19 Mei 2017, pukul 00.35

Menurut James Midgley, konsep pendekatan Pembangunan Sosial ini melampaui pendekatan residual dan institusional yang telah mendominasi pemikiran tentang kesejahteraan sosial di masa lalu. Disebutkan bahwa pendekatan residualist merekomendasikan bahwa sumber daya publik yang terbatas ditargetkan pada bagian populasi yang paling membutuhkan, pendekatan institusional mendorong keterlibatan luas negara dalam semua aspek kesejahteraan sosial. Alhasil kedua pendekatan ini menciptakan intervensi sosial yang merupakan bagian dari ekonomi dan bergantung secara pasif pada ekonomi dalam aspek pendanaan. Maka dari itu, pendekatan Pembangunan Sosial melampaui debat residualist-institusionalist dengan menghubungkan kesejahteraan sosial secara langsung dengan kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Yang terpenting Dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh secara sosial dan ekonomi adalah dengan menekankan perlunya komitmen yang lebih luas oleh negara, korporasi, NGO dan aktor-aktor lainnya terhadap pembangunan ekonomi dan menekankan betapa pentingnya intervensi sosial yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.⁹

1. Pembangunan Sosial sebagai Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Konsep Pembangunan Sosial dapat kita artikan sebagai pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat atau yang disebut dalam buku

⁹ James Midgley. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London. SAGE Publications. Hal. 1

tersebut adalah *Social Welfare* atau kesejahteraan sosial. Lebih jauh, gagasan tentang kesejahteraan sosial ini sangat penting bagi konsep pembangunan sosial. Istilah kesejahteraan sosial sendiri banyak disalahgunakan, di Amerika Serikat banyak yang menyebutkan dan menyamakan istilah ini dengan amal atau bantuan publik untuk keluarga miskin dan anak-anak mereka. Lebih jauh lagi, wanita Amerika yang mendapatkan kesejahteraan dituduh 'ibu kesejahteraan' yang berkonotasikan malas, tidak ingin bekerja dan mengeksploitasi pelayanan oleh pemerintah, miris sekali jika kita mengetahui pengertian aslinya yaitu sesuatu yang mulia, yang mengacu secara luas pada keadaan kesejahteraan sosial, kepuasan dan kemakmuran.

Sementara itu, James Midgley menggunakan istilah Kesejahteraan Sosial atau *Social Welfare* ini mengacu pada kondisi sosial, bukan untuk kegiatan amal oleh individu, filantropi, badan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu, Pembangunan Sosial berbeda dengan filantropi sosial, pekerjaan sosial dan administrasi sosial dalam beberapa aspek. Pembangunan Sosial berfokus pada komunitas atau masyarakat dan pada proses dan struktur sosial yang lebih luas, sementara filantropi dan pekerjaan sosial berfokus pada individu dengan memberikan dan menyediakan barang atau jasa kepada individu-individu tersebut. Tentu saja, pendekatan pembangunan sosial lebih komprehensif dan universalistik, dengan melakukan pembangunan sosial

tidak hanya diperuntukkan individu saja, akan tetapi konsep pembangunan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh populasi.¹⁰

James Midgley melalui buku tersebut kemudian mendefinisikan konsep *Social Development*, “as a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”¹¹ – sebagai proses perubahan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam hubungannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Sekali lagi melalui buku ini penulis ingin menunjukkan, upaya untuk menghubungkan pembangunan sosial dan ekonomi merupakan ciri khas tersendiri dari konsep Pembangunan Sosial.

Oleh karena itu, pada intinya konsep Pembangunan Sosial atau *Social Development* secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses sosial dan ekonomi, dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek integral dari pembangunan yang dinamis. Dalam proses pembangunan, pembangunan sosial dan ekonomi ibaratkan dua sisi mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak dapat berlangsung tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak ada artinya kecuali jika disertai dengan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Ibid hal.23

¹¹ Ibid hal.25

2. Aktor-Aktor Pembangunan dan Kemitraan dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Dalam pembangunan, peran dari aktor-aktor yang terlibat sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, semisal aktor negara, aktor non-negara yang telah disebutkan beberapa kali sebelumnya. Lebih lanjut, kemitraan atau kerjasama diantara aktor-aktor yang terlibat menjadi instrument penting dalam beberapa tahun terakhir ini jika berbicara soal pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Efektifitas dan efisiensi dari pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh sinergi dan integrasi 3 aktor: pemerintah (negara), swasta (MNC/TNC atau korporasi) dan masyarakat sipil (LSM – Lembaga Swadaya Masyarakat). Kolaborasi atau kemitraan yang kemudian didasarkan pada konsep CSR akan mendorong potensi kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, CSR dari korporasi atau perusahaan swasta dapat dijadikan sebagai alasan wajib untuk peduli dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Pada saat ini, perusahaan swasta atau korporasi mengalami perubahan perilaku yang signifikan jika menyangkut permasalahan sosial, begitupun dengan LSM. Dalam kasus korporasi, kini lebih bertanggungjawab dan ‘peka’ terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tekanan yang muncul dari pemerintah, LSM, lembaga-lembaga internasional dan pihak-pihak terkait serta adanya kesadaran yang muncul dari korporasi itu sendiri menjadi pendorong utama mengapa korporasi mulai ‘memperhatikan’ masyarakat.

Meskipun pada dasarnya, poin-poin seperti *Mutual Dependence* (saling bergantung), dan pasar sebagai institusi sosial yang ditemukan pada konsep CSR yang telah dijelaskan sebelumnya menyebutkan bahwa korporasi membutuhkan masyarakat atau mulai memahami kebertanggungjawaban sosial itu semata-mata juga agar bisnis dapat berkelanjutan. Hingga pada akhirnya, masyarakat kemudian ‘mampu’ memiliki kuasa atas pasar ketika pada akhirnya peraturan-peraturan pada sistem ekonomi kemudian mempengaruhi pola interaksi korporasi terhadap masyarakat itu sendiri. Namun, tetap korporasi juga pada intinya merupakan bagian dari masyarakat juga, dan bertanggungjawab juga atas permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Disisi lain, LSM juga mengalami perubahan cara pandang dan perilaku terhadap korporasi yang utamanya mengedepankan narasi-narasi kebencian. Kebanyakan LSM memiliki pandangan bahwa korporasi sebagai sebuah organisasi hanya melihat dunia sebagai wadah perputaran uang saja, hingga pada akhirnya melakukan apa saja demi keuntungan bisnis korporasi semata, misalnya merusak lingkungan dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. LSM saat ini sudah mulai melihat perlu dan pentingnya membangun kerjasama dengan korporasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Kerjasama korporasi dan LSM dalam rangka mensejahterakan masyarakat dibutuhkan guna sukseksi pembangunan internasional yang berkelanjutan. Sudah saatnya korporasi dan LSM bersinergi dan bermitra mewujudkan sumber

penghidupan berkelanjutan. Kemitraan kedua aktor ini dapat diwujudkan berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing korporasi dan LSM, misal LSM memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mendampingi masyarakat sehingga LSM secara tidak langsung sangat ‘dekat’ dengan masyarakat sehingga mengetahui langsung kebutuhan masyarakat.

Agenda pembangunan internasional beberapa kali termaktub dalam program terkoordinasi yang disepakati oleh beberapa kepala negara dan perwakilan 180 negara lebih Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Millenium Development Goals (MDGs)* salah satu contohnya. Secara singkat, agenda MDGs ini dimulai pada tahun 2000 dan berisi 8 poin yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat dan mensejahterakan rakyat di seluruh dunia. MDGs kemudian menjadi tantangan bersama seluruh negara di dunia, tantangan yang juga bagian dari komitmen bersama para pemimpin dunia untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan lain-lain. Targetnya, paling tidak seluruh negara dapat menyelesaikan tantangan pembangunan yang ada pada tahun 2015 yang lalu.

Meskipun pada akhirnya, dunia masihi menghadapi permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan bersama tersebut pada tahun 2015 lalu itu, namun keseriusan dan komitmen bersama negara-negara akan program Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* menjadi pencapaian tersendiri, ketika *Post-Program* dari MDGs yaitu *Sustainable Development*

Goals (SDGs) muncul sebagai bukti atau fakta konkrit betapa dunia sekarang ini sangat serius terhadap program pembangunan berkelanjutan.

C. Strategi Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Zambia

Di dalam buku mengenai *Social Development*-nya tersebut, James Midgley juga memberikan penjabaran eksplisit mengenai proposal praktis untuk mewujudkan pembangunan sosial menjadi kenyataan atau fakta, tidak terkungkung pada tataran konsep saja. James Midgley menggunakan beberapa istilah seperti kebijakan, perencanaan, program-program, proyek dan strategi secara longgar untuk menyebutkan strategi-strategi pembangunan sosial tersebut. Strategi yang diberikan oleh James Midgley tidak terbatas pada masalah kesejahteraan saja tapi juga untuk memberikan penyelarasan intervensi sosial dengan aktivitas pembangunan ekonomi. Meskipun akan terlihat bahwa beberapa strategi lebih tendensi difokuskan pada kegiatan ekonomi, namun demikian strategi ini tidak meninggalkan “ruh utama” nya dalam mempromosikan kesejahteraan sosial melalui hubungannya dengan pembangunan ekonomi.¹² Ada 3 strategi utama dalam pembangunan sosial tersebut, diantaranya adalah: *Social Development By Individuals*, *Social Development By Communities* dan *Social Development By Governments*.

¹² Ibid hal.103

Secara ringkas, strategi *Social Development by Individuals* atau pembangunan sosial oleh individu disebutkan bahwa kesejahteraan sosial dapat dipromosikan dengan baik ketika individu secara mandiri mampu mengejar kepentingan diri mereka sendiri, sebab itu, melalui kesejahteraan seluruh masyarakat meningkat ketika individu berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan mereka sendiri. Strategi ini juga diketahui sebagai pendekatan individualis atau pendekatan perusahaan, mungkin saat ini bisa disebut juga sebagai pendekatan korporasi (MNCs/TNCs), secara ideologi pendekatan ini bermula pada ideologi liberal-kapitalis yang menekankan pada pentingnya kebebasan setiap individu untuk memilih atau memiliki modal (modal).

Di sisi lain, strategi *Social Development by Community* ini berangkat dari dasar pemikiran bahwa pembangunan sosial dapat dipromosikan dengan baik oleh orang-orang yang bekerja secara harmonis kemudian membentuk dasar atau basis strategi yang kita sebut sebagai pendekatan komunitarian dalam pembangunan sosial. Strategi Pembangunan sosial yang berlandaskan pembangunan komunitas juga sering didefinisikan sebagai kemitraan antara lembaga eksternal (NGO ataupun MNC) dengan komunitas masyarakat lokal. Pada pelaksanaannya, korelasi akan kemampuan antara masyarakat dan komunitas yang saling berkaitan satu sama lain terhadap keinginan untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, kemudian masalah sosial teratasi dan kesempatan untuk maju pun

tersedia. Maka dari itu, kemitraan keduanya merupakan strategi utama dalam pendekatan ini.¹³

Terkahir, strategi *Social-Development By Government* dikatakan juga sebagai pendekatan statis yang didasari oleh ideology sosialis atau kolektivis yang menekankan pada urgensi kolektivitas. Pemerintah dalam hal ini negara mewujudkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Singkatnya, pemerintah secara kolektif dimiliki oleh warga dan mewakili kepentingan warga negara tersebut. Pembangunan sosial yang dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga-lembaga dalam pemerintahan. Karena pada dasarnya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap pengimplementasian kebijakan pembangunan sosial yang selaras dengan pembangunan pada aspek ekonomi, tentu adanya partisipasi dari individu dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan sosial di suatu negara.¹⁴

D. Pendekatan Pembangunan Sosial Sebagai Alternatif Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Zambia

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Zambia secara singkat. Meskipun tercatat sebagai negara dengan pendapatan menengah ke bawah, meskipun juga

¹³ ibid. 116-118

¹⁴ ibid. 136-137

tercatat sebagai negara pengekspor tembaga ke beberapa negara dunia, akan tetapi permasalahan ekonomi dan sosial masih melanda negara yang terletak di kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut. Telah disebutkan dan ditunjukkan juga dengan data-data yang telah ditemukan oleh penulis betapa permasalahan kemiskinan dalam hal ini yang dipengaruhi oleh perekonomian Zambia yang pasang surut. Hal tersebut kemudian memunculkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat seperti kelaparan dan angka gizi buruk yang tinggi di Zambia, edpidemi HIV-AIDS yang mengakibatkan banyaknya anak-anak di Zambia yang yatim piatu, angka pengangguran tinggi, ketidaksetaraan gender dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Zambia tersebut, para *stakeholders* dalam hal ini pemerintah tidak hanya dapat memfokuskan pembangunan pada aspek ekonomi saja, melainkan juga memberikan fokus yang berimbang terhadap pembangunan pada aspek sosial di masyarakat.

Strategi-strategi pembangunan sosial yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dijadikan sebagai jalan alternatif dalam rangka mencoba untuk mengentaskan kemiskinan dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya di Zambia. Konsep *Social Development* yang diwacanakan oleh James Midgley akan memberikan dampak positif yang luar biasa apabila dikolaborasikan dengan peran dari aktor-aktor hubungan internasional di era globalisasi seperti sekarang ini. State actors, non-state actors, MNCs, TNCs, international Organizations, NGOs, Global Civil Societies dan sebagainya bisa menjadi

alternatif solusi cerdas jika dikaitkan dengan strategi-strategi pembangunan sosial yang dikembangkan oleh James Midgley diatas tersebut. Oleh sebab itu, penulis menjadikan aktivitas atau program kolaborasi atau kemitraan yang dilakukan oleh korporasi Goldman Sachs dan NGO Camfed International dalam memberdayakan perempuan di Zambia sebagai *role model* pengimplementasian secara tepat dari konsep *Social Development* itu di era globalisasi sekarang ini.

Adapun, penjabaran mengenai apa saja strategi pembangunan dan pemberdayaan atau program apa saja yang dilakukan oleh korporasi Goldman Sachs dan Camfed International di Zambia akan dijelaskan pada bab 4 selanjutnya.